

**GOOD GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
PERSPEKTIF MAQ ID AL-SHAR 'AH JASIR AUDA**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**



**Oleh:
Muhammad Solikhudin
F03416059**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Solikhudin, M. H.I
NIM : F03416059
Program : Doktor Studi Islam (S-3)
Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Pebruari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
A464BAHF242246663
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Solikhudin

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Muhammad Solikhudin ini telah disetujui Pada Tanggal 13 Juli 2018

Oleh

Promotor,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag, M.H
NIP. 19680309191996031002

Promotor,










Dr. K.H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada tanggal 27 Januari 2020


Tim Penguji:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag, | Ketua Penguji |  |
| 2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I | Sekretaris/Penguji |  |
| 3. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH | Promotor/Penguji |  |
| 4. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA | Promotor/Penguji |  |
| 5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag | Penguji Utama |  |
| 6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM | Penguji |  |
| 7. Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag | Penguji |  |

Surabaya, 02 Maret 2020

Direktur




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SOLIKHUDIN
NIM : F03416059
Fakultas/Jurusan : STUDI ISLAM.
E-mail address : Solikhudin.muhammad55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

GOOD GOVERNANCE dalam UU. No. 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi serta Perilaku Masyarakat yang Beradab.
JAFUR AUDA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2020

Penulis


Muhammad Solikhudin
nama terang dan tanda tangan

mengaplikasikan (tata kelola) pemerintahan yang baik (*good governance*) harus tetap digerakkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini terbukti dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka.” Selain itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”³

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yang dikehendaki oleh rakyat adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat lepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu juga telah telah dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor: VII tahun 2001, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk selanjutnya disingkat dengan KKN, dan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagai landasan untuk menciptakan

societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschaft, civil society, dan societa civile dipakai secara bergantian dengan *polis, civitas, etat, staat, state, dan stato*. Ketika JJ Rousseau menggunakan istilah *societes civile*, ia memahaminya sebagai negara, di mana salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya. Lihat Muhammad AS Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1999), 1.

³ Titik Triwulan Tutik & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 269. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), 98. Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1.

pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera.

Bangsa Indonesia ingin menjadikan *good and clean governance* ke dalam aturan hukum baru dimulai setelah terjadi krisis pada tahun 1997, yang diikuti dengan kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada bulan Mei 1998. Usaha ini dapat dilihat dengan adanya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan diikuti empat Peraturan Pemerintah, untuk selanjutnya disingkat dengan PP. Sebagai pelaksana UU No. 28 yaitu PP No. 65/1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67/1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, dan PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Namun, usaha untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih menemui kendala. Ada beberapa kasus penyimpangan kekuasaan yang menyalahi aturan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Pada Pemilu 2013 (2/10/2013), KPK menangkap ketua MK Akil Mochtar karena menerima suap pemilu Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang dilakukan calon Bupati Hambit Bintih. Ia merupakan tersangka

berbangsa, yang kemudian penulis urai dengan menggunakan pisau analisis *Manhaj Maq id*, apakah hal itu dapat dipakai sebagai acuan, kemudian diriilkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menanggapi pertanyaan tersebut penulis tuangkan pikiran penulis dalam sebuah tulisan yang berjudul *Good Governance* dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Perspektif *Maq id al-Shar'ah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terdapat beberapa identifikasi masalah di sini, dengan mengingat kajian ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan pendekatannya adalah *Manhaj Maq id*, maka di antara identifikasi itu adalah:

1. Jika melihat *rationale* sosial politik kemunculan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, maka terdapat tuntutan masyarakat untuk terselenggaranya *good governance*. Upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu diapresiasi dan direspon secara baik dan bijaksana.
2. Hasil perundangan tentang *good governance*, terdapat sisi negatif seperti masih adanya pejabat publik yang melakukan penyimpangan, karena UU hanya dipahami sebagai undang-undang saja tanpa aplikasi langsung di lapangan.
3. Permasalahan kesejahteraan masyarakat. Tidak sesuai dengan fitur hirarki-saling berkaitan dalam *Manhaj Maq id*.

4. Asas-asas *good governace* seperti akuntabilitas pejabat publik belum terlaksana secara maksimal. Tidak sesuai dengan fitur *purposefulness* dalam *Manhaj Maq id* .
5. Permasalahan pelayanan publik yang belum baik, tidak sesuai dengan fitur *purposefulness* dalam *Manhaj Maq id* .
6. Kesalahan dalam memilih orang-orang yang akan masuk dalam lingkaran birokrasi serta posisi kunci kekuasaan. Memang birokrasi merupakan organisasi pelaksana pemerintahan yang netral. Namun, masuknya orang-orang yang salah dalam badan yang netral dapat menyebabkan posisi strategis itu menjadi rawan dan mudah untuk disalahgunakan. Seharusnya ada pola *recruitment* dengan metode *fit and proper test* yang ketat dan professional, sehingga yang masuk di dalamnya adalah orang-orang pilihan dan memiliki *track record* yang benar-benar bersih dari KKN.
7. Miskinnya moralitas dan pemahaman terhadap ajaran agama. Fritjof Capra dan FDE Schleirmecher pernah menandakan bahwa krisis budaya, ekonomi dan politik para penguasa yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
8. Lemahnya rasa cinta terhadap negara (nasionalisme). Dapat dikatakan, orang-orang yang melakukan praktik KKN, adalah mereka yang telah kehilangan spirit nasionalismenya. Orang yang cinta pada negaranya, tidak mungkin melakukan tindakan yang dapat membuat negaranya menjadi terpuruk. Dalam lingkaran kekuasaan, biasanya jiwa nasionalisme dapat hilang begitu saja, jika kepentingan pribadi atau

Good governance adalah salah satu tema penting dalam berbagai diskursus politik pemerintahan di masa reformasi. Terminologi yang dulu sering digunakan adalah *good government* yang dapat dikaitkan dengan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pemakaian terminologi *good governance* merupakan perubahan dari terminologi *good government* yang bertujuan untuk lebih memperdalam jangkauan konsep tersebut. *Pertama*, perubahan dari *government* menjadi *governance* memperlihatkan bahwa yang memerlukan prinsip ini bukan hanya pemerintahan dalam arti sempit, yaitu eksekutif, namun kesemua dimensi dan jaringan penyelenggaraan negara. Bahkan termasuk pula aktivitas organisasi yang dilakukan oleh masyarakat. *Kedua*, kata *governance* mewakili keseluruhan proses dalam suatu tatanan, bukan hanya pada kelembagaan yang diwakili kata *government*. Oleh karena itu, *good governance* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tata pemerintahan yang baik. Maksud *good governance* tidak hanya pemerintahan yang bersih, namun juga harus memenuhi aturan-aturan kebaikan tertentu.³⁹

Good governance merupakan proses untuk membuat, dan melaksanakan keputusan. Ini bukan tentang membuat keputusan yang 'benar', tetapi tentang proses terbaik untuk membuat keputusan tersebut. Proses pembuatan keputusan yang baik dan karena tata kelola yang baik. Hal tersebut terdapat beberapa karakteristik. Semua karakteristik itu memiliki efek positif pada berbagai aspek pemerintah, baik lokal maupun pusat,

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), 80.

6. *Equality*, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang untuk meningkatkan atau melindungi kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, proses dan institusi menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan memakai sumber yang dimiliki sebaik mungkin.
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada masyarakat dan institusi *stakeholder*. Akuntabilitas ini berhubungan dengan organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, misalnya apakah keputusan tersebut untuk kepentingan dalam atau luar organisasi.
9. *Strategic vision*, para pemimpin dan masyarakat harus memiliki tinjauan *good governance* dan pengembangan manusia yang mendalam, serta jauh ke depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan semacam ini.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dalam Islam yang keberadaannya dapat dipakai acuan, namun, hukum Islam juga harus diselaraskan dengan waktu dan tempatnya. Hukum Islam relevan dengan masa kini, sehingga pada saat yang sama hukum Islam tidak kehilangan signifikansinya (*maghzanya*). Terkait dengan hukum Islam yang penulis pakai sebagai pendekatan ini adalah *Manhaj Maq id* Jasser Auda.

Tulisan *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, karya Moh. Mahfud MD. Tulisan ini menjelaskan relasi antara penegakan hukum dan *Good Governance*. Kemunculan masa reformasi menuntut perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang korup, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus diganti dan dikembalikan kepada asal usul pembentukannya, yaitu untuk menjaga dan memenuhi hak dan kepentingan warga serta untuk mencapai tujuan nasional.⁶⁴ Asas-asas negara hukum dan pemerintahan yang demokratis menjadi arus utama reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang memunculkan sudut pandang baru yang dikenal dengan istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Buku *Governance Intelligence and Quotient*, karya Fadillah Putra. Buku ini menyajikan seputar cara menjadi pemimpin yang baik dan pada saat yang sama mampu merekrut penasihat yang cerdas, serta orang-orang yang ada di sekitarnya yang cerdas, sehingga berdampak pada kemajuan organisasi yang dijalankan.

Mempelajari *Governance Intelligence* merupakan hal penting, dalam konteks Indonesia, keberhasilan sebuah pemerintahan, baik dalam aspek kebijakan maupun perencanaannya, sangat tergantung pada aspek pemimpinnya (*leadership*).⁶⁵ Sementara, pola kepemimpinan yang ada secara tradisional masih tergolong paternalistik. Hal ini dapat dilihat dari betapa

⁶⁴ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik*, Artikel dalam Buku *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 431.

⁶⁵ Dilansir dari Kata pengantar dalam buku *Governance Intelligence and Quotient*, karya Fadillah Putra. Lihat Fadillah Putra, *Governance Intelligence and Quotient*, (Malang: UB Press, 2012), v.

yang menjelaskan hal-hal yang memicu munculnya persoalan dan alasan-alasan mengapa masalah tersebut diangkat. Identifikasi masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah merupakan perumusan masalah-masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian sebagai target dari diadakannya penelitian, yang disarikan dari rumusan masalah. Sedangkan isi pembahasan ditujukan untuk kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

Kerangka teoritik merupakan gambaran umum analisis disertasi. Penelitian terdahulu berisi tentang penelaahan bahan kepustakaan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian memuat paparan metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Pendekatan penelitian dalam disertasi ini. Terakhir, sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mengatur pembahasan agar runtut.

Bab II, *Good Governance* yang merupakan bagian kajian umum teori, berisi tentang definsis *good governnace*, sejarah kemunculan *good governance*, Asas-Asas *good governance*, disambung pembahasan *good governance* dalam hukum Islam, dan *good governance* dalam *Maq id al-Shar 'ah*

Bab III, Penyelenggaraan *Good Governance* dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menjelaskan tentang politik hukum Islam dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, pandangan peneliti terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan Relevansi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Bab IV, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Sebagai Acuan dalam Membangun *Good Governance* Perspektif *Maqasid al- Shari'ah* , Bab ini merupakan analisis data yang mengacu pada substansi dan rumusan masalah, yang berisikan tentang penetapan Undang-Undang No. 28 perspektif *Good Governance* dan tinjauan *Manhaj Maq id* terhadap asas *good governance* dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Bab V, Penutup, Bab ini terdiri atas kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran penulis kepada pihak-pihak terkait, implikasi teoritik, keterbatasan studi, rekomendasi, dan diakhiri dengan kata-kata penutup.

Melalui sistematika pembahasan ini, pembaca merasa mudah dalam memahami isi yang terkandung dalam tulisan ini, karena tergambar pikiran yang diinginkan oleh penulis terkait dengan *good governance* melalui pendekatan *Manhaj Maq id* .

Istilah “*government*” dan “*governance*” dalam kamus seringkali dianggap mempunyai makna yang sama yaitu metode mengaplikasikan otoritas dalam suatu organisasi, institusi atau Negara. *Government* atau pemerintah juga diartikan sebagai entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara.³

Kata *governance* secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *kybernan* ke *gubernare* Latin dan ke *gubernur* Prancis Kuno. *Kybernan* berarti untuk 'mengarahkan', 'panduan' atau 'mengatur'.⁴ Kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, mengartikan *govern* dengan pengaturan secara hukum dan menjalankan (mengelola) kota atau Negara.⁵ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily memaknai *govern* dengan memerintah Negara, menguasai keadaan, dan menentukan keputusan.⁶

Kata *governance* digunakan dalam diskursus akademik berkaitan dengan kajian keilmuan, yakni politik pembangunan (*developmental politics*), administrasi publik, dan hubungan internasional. Namun, makna yang terdapat di kamus tadi masih kurang luas. Institusi-institusi internasional, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *World Bank*, dan *United Nations Development*

³ Sofian Effendi, “Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama” (Paper—Universitas Gadjah Mada), 1.

⁴ Zafar Iqbal dan Mervyn K. Lewis, *An Islamic Perspective on Governance* (Nortampton-USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), 2.

⁵ Victoria Bull (ed), *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 192.

⁶ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia, 2008), 276.

pembuatan kebijakan harus benar-benar partisipatoris, akuntabel, dan responsif pada wilayah politik, ekonomi, dan budaya sipil sehingga *human governance*, pada dasarnya bertujuan membuat *good political governance*, *good economic governance*, dan *good civic governance*.

World Bank mendefinisikan *governance* sebagai cara/sikap kekuasaan yang dipakai untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial sebuah Negara. Dalam laporannya pada tahun 1994, World Bank menjelaskan tiga aspek penting dalam ekologi *governance*.¹³ Pertama, terkait struktur rezim politik sebuah Negara. Bagi World Bank, struktur ini sangat urgen karena berkaitan dengan sikap dan perilaku elite politik dalam struktur tersebut yang memiliki peran penting dalam perubahan kebijakan. Kedua, World Bank mengutamakan pada proses bagaimana sumber daya ekonomi dan sosial tersebut diatur dengan baik. Pengaturan sesuai tuntunan World Bank selalu berpijak pada pertumbuhan ekonomi, yang dapat berupa angka-angka pertumbuhan yang kemudian ditafsirkan ke dalam tingkat kesejahteraan yang telah diperoleh. Ketiga, kapasitas pemerintah secara institusional untuk mendesain, merumuskan sampai menerapkan kebijakan. WB melihat kapasitas ini berpengaruh terhadap proses kebijakan domestik yang dijalankan.

Arti *good* dalam *good governance* memiliki dua pengertian. Pertama, nilai yang menunjang tinggi keinginan/kehendak masyarakat dan nilai yang

¹³ World Bank, *Governance, the World Bank's Experience* (Washington: The World Bank, 1994), i-xiv. Lihat International Fund for Agricultural Development, *Good Governance: An Overview* (Paper—IFAD), 2. World Bank Institute, *Good Governance and its Benefits on Economic Development An Overview of Current Trends* (Paper—The World Bank Group), 2-3.

- 2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melaksanakan usaha pencapaian tujuan bernegara.

Kata *governance* berawal dari kata *to govern* (yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order*), yang maknanya memerintah. *Government* atau pemerintah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan : "*The authoritative direction and administration of the affairs or men/women in a nation, state, city, etc*". Pemerintah merupakan pengarah yang berkewenangan dan mengatur kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota, dan sebagainya. Dapat diterjemahkan juga sebagai institusi atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, kota, dan sebagainya.²⁰

Hadi Soesastro menjumbuhkan (menyamakan) istilah *governance* dengan istilah pentadbiran (fungsi pengurusan yang terdapat dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan), namun diakuinya sendiri bahwa terminologi ini masih terdengar asing. Sementara menurut, Sadu Wasistiono bahwa dalam bahasa Indonesia istilah *governance* ada yang mengartikannya dengan tata pemerintahan dan ada pula yang mengartikannya dengan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 tentang PROPENAS menggunakan istilah pemerintahan yang baik

²⁰ Muhammad Irfan dkk, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: Departemen Agama RI-Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tatalaksana, 2006), 12. Muhammad Ali, *Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective* (Paper—University of Karachi), 3. Dirk Niebel, *Good Governance in Practice: Approaches and Examples form Development Practice* (Berlin: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2012), 5.

dalam konteks merealisasikan penegakan hukum dan pemerintahan yang baik.²¹

Menurut Sheng, *governance* mempunyai makna: “*the process decision making and the process by which the decisions are implemented or not implemented*”. Jadi, *governance* atau tata kelola adalah proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan dan tidak diimplementasikannya keputusan yang diambil. Istilah *governance* sendiri dapat diterapkan di beberapa konteks, misalnya *corporate governance* (tata kelola perusahaan), *international governance* (tata kelola internasional), dan *local governance* (tata kelola daerah).²²

Jika *good governance* ini dibahas dalam konteks pemerintahan, kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas asas-asas di dalamnya. Bertolak dari asas-asas ini akan diperoleh tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya tata kelola dapat dinilai jika ia telah berkaitan dengan semua unsur asas-asas *good governance*.²³

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 157-158.

²² Elia Mustikasi, *Kepemimpinan yang Menyiapkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sebagai Ujung Tombak Kesuksesan Pembangunan Jawa Timur*, dalam Buku *Administrative Reform, Pakde Karwo, Birokrasi itu Melayani*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2015), 204. Lihat Paper of Governance, *Good Governance—The Concept* (Work Paper—Good Governance in Multiethnic Communities, tt), 2. Lihat United Nations and Social Commission for Asia and The Pacific, *What is Good Governance* (Bangkok: UNESCAP, tt), 1.

²³ Ibid. Lihat juga Good Governance Institute, *Good Governance Handbook* (London: Healthcare Quality Improvement Partnership Ltd, 2015), 4.

Negeri Belanda (yang juga diikuti oleh Ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia) dikenal sebagai “prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik.” Asas ini bermuatan tata aturan yang harus dipakai oleh administrasi Negara dan juga oleh Hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan riil administrasi Negara. Asas ini pun memuat beberapa hal, antara lain: motivasi yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak memakai wewenang yang menyimpang dari tujuan, *fairness*, dan lain-lain.

- b. Ditinjau dari arti luas, administrasi Negara sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan (eksekutif), selain mempunyai konsentrasi kekuasaan yang makin besar, juga berkaitan dengan rakyat. Perbuatan-perbuatan penertiban, perizinan, dan berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi Negara yang langsung berkaitan dengan rakyat. Segala bentuk penyelewengan kekuasaan atau cara-cara bertindak yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan administrasi Negara yang baik akan langsung dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang atau merugikan orang tertentu ataupun rakyat banyak. Karena itu, betapa penting penerapan asas-asas di atas untuk mencegah dan menghindari rakyat dari segala tindakan administrasi Negara dan dapat merugikan rakyat. Namun, cabang-cabang penyelenggara Negara yang lain, seperti pembentuk Undang-

Undang (DPR) atau penegak hukum (kekuasaan kehakiman) perannya dalam mewujudkan dan memunculkan pemerintahan yang baik adalah kurang atau belum baik. Pembentukan Undang-Undang dapat membuat Undang-Undang yang sewenang-wenang. Berbagai Undang-Undang yang dibuat belum tentu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, namun untuk kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok tertentu yang tentu saja dominan, seperti para konglomerat dan lain-lain.

Bagi rakyat secara luas, perwujudan pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan penjagaan dari berbagai perbuatan sewenang-wenang baik atas diri, hak, maupun harta bendanya. Terkait pelayanan dan perlindungan, ada dua cabang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan rakyat, yaitu administrasi Negara dan juga penegak hukum. Karena itu sangat wajar jika tuntutan penerapan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaruan administrasi Negara dan pembaruan penegakan hukum. Pelayanan yang dipanjang-panjangkan atau *bertele-tele* (birokratisasi), bukan hanya memperlambat, namun juga menjadi suatu fungsi “komersial”, karena melahirkan sistem “uang pelicin”, “hadiah” yang tidak lain dari bentuk suap. Hal serupa terjadi pada penegakan hukum.²⁷ Keadilan yang

²⁷ Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila lembaga penegak hukum dan peradilan menerapkan prinsip *good governance*. Lihat Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik*, dalam *Buku Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 432.

pemerintah harus turut campur dalam kehidupan rakyatnya (*freies ermesen*). Hal ini sering memunculkan kerugian bagi warga masyarakat. Untuk itulah, dibentuk suatu komisi yang dipimpin oleh De Monchy yang bertugas untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat sehingga tidak dizalimi oleh penguasa.³⁹ Komisi ini mempelajari yurisprudensi sehingga mengeluarkan suatu laporan yang bermuatan pokok-pokok perlindungan hukum bagi masyarakat. Laporan itu berisikan asas-asas yang diberi nama *algemene Beginselen Van Behoorligh Bestuur (General Principles of Good Govment/Adminisitratio*n atau Asas-asas pemerintahan yang baik)⁴⁰

Pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an gagasan *governance* atau *good governance* mulai berkembang di lembaga pembangunan multilateral. Konsep *good governance* sebagai tema baru dalam pertolongan pembangunan sering dirujuk sebagai peralihan yang signifikan dalam sistem pembangunan multilateral.⁴¹

Pada zaman Soekarno hingga saat ini konsep dan penerapan *good governance* sebenarnya sudah dilaksanakan namun belum maksimal, meskipun pada masa Soekarno belum menggunakan penamaan *good governance*.⁴² Konsep yang mengemuka saat itu adalah Pancasila yang

³⁹ Komisi ini dibentuk Belanda pada tahun 1946 dan pada tahun 1950 komisi ini melaporkan hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini ternyata tidak semua disetujui pemerintah dan akhirnya komisi ini dibubarkan pemerintah. Kemudian muncul komisi *van de Greenten* yang juga bentukan pemerintah Belanda dengan tugas yang sama dengan de Monchy. Lihat Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 231.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Thomas Dam, "Good Governance in the Multilateral Development System" (Paper—University of Oslo, Norwegia, 2001), 2.

⁴² Konsep *good governance* tidak bisa berkembang secara baik di Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor yang kompleks, di antaranya adalah kegagalan Indonesia sejak awal masa kemerdekaan membangun pemerintahan yang demokratis, kredibel, dan akuntabel yang mammpu

diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat dapat membangkitkan komitmen mereka yang lebih kuat, perhatian lebih baik dan lebih kreatif dalam memecahkan problem.

Ketiga, pemerintah yang kompetitif (*competitive goverment*)⁶⁶, menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan. Pemberian jasa/layanan harus berkompetisi dalam upaya berdasarkan kinerja dan harga. Kompetisi merupakan kekuatan mendasar yang tidak memberikan pilihan lain yang harus dilaksanakan oleh organisasi publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli, namun harus bersaing secara sportif.

Keempat, Pemerintahan digerakkan oleh misi (*mission-driven goverment*)⁶⁷, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi. Secara internal, dapat diawali dengan mengeluarkan peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi. Perlu dilihat kembali visi tentang apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Misi pemerintah harus nyata dan peraturan perundangan tidak boleh berseberangan dengan misi tersebut. Apa yang tidak dapat dilaksanakan pemerintah diatur dalam mandatnya. Tujuan pemerintah bukan mandatnya, tetapi misinya. Contoh: metode penyusunan APBD. APBD memang harus disusun berdasarkan suatu prosedur yang benar dan baku,

⁶⁶ David T. Osborne, "Reinventing Government" *Journal Leadership*, Vo. 6, No. 1 (Januari, 1993), 2.

⁶⁷ Yanto Heryanto, Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia" *Jurnal Logika*, Vol. 12 No. 3 (2014), 33.

Berbagai-bagai bentuk pengawasan, baik yang ditujukan kepada aparaturnya penyelenggara Negara maupun yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan masyarakat dalam bentuk pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat, yang pada dasarnya telah cukup memadai apabila dilaksanakan secara terus menerus dan konsekuen dengan disertai tindakan administratif maupun tindakan hukum. Tetapi, kenyataan yang dihadapi adalah pelaksanaan masing-masing pengawasan belum berjalan dengan baik.

Realisasi pengawasan melekat yang belum efektif karena dilakukan oleh pihak yang sama-sama melakukan tindakan penyelewengan atau karena masih adanya perasaan *ewuh pakewuh* untuk melakukan tindakan disiplin secara tegas. Sedangkan pengawasan fungsional juga tidak efektif, karena masih didapati aparat pengawasan fungsional pemerintah yang memiliki perilaku belum terpuji dan bermental yang belum baik. Pengawasan legislatif juga sangat dipengaruhi oleh kualitas legislatif secara kelembagaan maupun individu anggota legislatif dengan kenyataan yang dihadapi saat ini adalah ketidakmampuan legislatif mengawasi eksekutif, karena kehidupan partai politik belum sepenuhnya mendorong usaha-usaha pengawasan yang efektif.

Pengawasan dari semua pemangku kepentingan dalam Negara demokrasi perlu diefektifkan, mengingat Indonesia adalah Negara hukum⁹³

⁹³ Konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara demokrasi. Kedua konsep tersebut saling isi mengisi dan merupakan prasyarat dari yang satu terhadap yang lainnya. Lihat Munir Fuady, *Konsep negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 19. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Lihat

tidak membahagiakan. Kemiskinan hakikatnya lebih dikarenakan oleh adanya kesalahan kebijakan dan aplikasi kebijakan ekonomi politik di masa lampau. Bahkan, hingga sekarang masih terjadi.

Pada bidang politik, penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat dirasakan, terutama dengan dominasinya kepentingan penguasa dalam menentukan kehidupan rakyat. Selain itu juga, dalam bidang hukum menyebabkan terciptanya ketidakadilan masyarakat serta terjadinya krisis penegakan hukum yang diikuti krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang terus menerus.

Pada bidang budaya, terjadi beragam kesenjangan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh penyeragaman budaya yang diwarnai oleh adanya dominasi budaya tertentu. Sehingga budaya-budaya lokal lainnya mengalami proses peminggiran, bahkan cenderung dikalahkan dalam kancah kebudayaan nasional.

Jika diperhatikan dari sumber masalahnya, maka tidak dapat dihindari bahwa kesalahan kebijakan dan penerapannya adalah tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah yang lampau maupun saat ini. Dengan kata lain, pertanggungjawaban itu harus terealisasikan dalam suatu agenda penyelenggaraan *good governance*. Sebab dengan agenda inilah cita-cita bangsa untuk mengejewantahkan masyarakat madani akan menjadi suatu kenyataan.

sumber daya sampai pada distribusi sosial. Keseluruhan proses pembangunan merupakan bagian dari peran negara⁴ dalam mewujudkan kesejahteraan.

Negara kesejahteraan mempunyai tanggung jawab dan peran yang penting dalam ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar di tingkat tertentu bagi warga negara dan selalu aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasi warga negara.⁵

Organisasi pemerintahan menanggung beban tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan-tujuan nasional, di antaranya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, para pejabat negara harus mengutamakan keinginan rakyat, dan segala perbuatannya harus taat hukum. Tidak boleh terjadi pelaksanaan tugas oleh penyelenggara pemerintah yang cacat hukum dan merugikan rakyat.⁶ Negara Indonesia mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk kemudian disingkat dengan KKN dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pembahasan ini akan menguraikan politik hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, pandangan peneliti terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Relevansi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yakni:

⁴ Menurut pandangan Socrates: semua manusia menginginkan kehidupan aman, tenang dan lepas dari gangguan yang memusnakan harkat manusia. Kala itu orang-orang mendambakan ketenteraman menuju bukit dan membangun benteng, serta mereka berkumpul disana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Socrates dinamakan polis (satu kota saja). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tapi juga tentang kepribadian orang-orang disekitarnya. Socrates menganggap polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. Lihat Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 21.

⁵ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013), 176.

⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 241.

dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperluas tugas dan kewenangannya?

Pembentukan Komisi Tetap Pemeriksa yang bersifat independen adalah sesuai dengan amanat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dengan tugas khusus yang berbeda dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kekhususan tugas Komisi Tetap Pemeriksa terutama adalah untuk mendata dan mengevaluasi harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat sebagai pejabat negara. Sedangkan tugas BPK sebagaimana diketahui dari Pasal 23 ayat (5) adalah lebih dititik beratkan untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.

Apabila hakim sebagai pejabat negara dalam putusannya berindikasikan kolusi, bagaimana cara Komisi Tetap Pemeriksa memeriksa hakim tersebut. Komisi Tetap Pemeriksa merupakan komisi yang independen sehingga tidak terkait dengan lembaga eksaminasi yang selama ini berfungsi menilai kemampuan dan profesionalitas hakim.

Jika terjadi kasus bahwa hakim diketahui berindikasi melakukan KKN, maka Komisi Tetap Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan hakim yang dalam RUU ini diklarifikasi sebagai penyelenggara negara dan tidak berwenang melakukan pemeriksaan yang menyangkut kewenangan teknis yudisial, karena kewenangan tersebut berada pada Mahkamah Agung dalam kerangka "*Judicial independence principle*".

Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa fungsi pemeriksaan sebelum seseorang diangkat selaku Pejabat Negara adalah bersifat pendataan dan

yang hendak dicapai (*doelmatigheid*). Tujuan tersebut adalah terciptanya Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari KKN. Dengan demikian pengertian Penyelenggara Negara tidaklah hanya terbatas pada Penyelenggara Negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, melainkan juga mencakup Direksi dan Komisaris di lingkungan BUMN atau BUMD (Pasal 22).

F-KP menyatakan bahwa dalam RUU tentang KKN ini belum menemukan materi yang mengatur adanya sistem penyelenggaraan Negara yang efektif dan efisien sehingga mampu mencegah terjadinya KKN. Hal ini sangat perlu karena penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN tidak hanya dapat diwujudkan melalui pembentukan dan pemeriksaan oleh Komisi Tetap Pemeriksa terhadap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 RUU.

Peraturan perundang-undangan secara implisit dan eksplisit sudah memuat berbagai norma-norma hukum yang ditujukan untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut adalah pengaturan tentang asas-asas Penyelenggara Negara yang baik dan partisipasi masyarakat yang diharapkan akan sangat bermanfaat.

F-KP menanyakan juga mengenai mengapa hanya Anggota Komisi Tetap Pemeriksa dari Sub Komisi Yudikatif yang diberikan syarat khusus, yaitu terdiri atas mantan hakim, akademisi, atau profesional di bidang hukum yang mempunyai integritas tinggi. Pasal 19 ayat (3). Pengaturan dalam Pasal 19 ayat (3) RUU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

Negara sesuai Amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Mengenai masalah ini dapat dijelaskan bahwa sistem struktural strata pangkat dan jabatan yang berlaku di lingkungan ABRI tidak dapat diterapkan dalam sistem struktural strata pangkat dan jabatan yang menyangkut pemeriksaan terhadap penyelenggara negara karena Komisi Tetap Pemeriksa diberi kewenangan untuk memeriksa siapapun tanpa memandang pangkat dan jabatan penyelenggara negara yang bersangkutan.

F-ABRI menanyakan juga bagaimana caranya UU ini di satu sisi menggugah sikap keterbukaan penyelenggara negara, di sisi lain mendorong tumbuhnya sikap mental masyarakat untuk berani memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana KKN secara bertanggung jawab.

Penyelenggara negara bersifat terbuka (transparan) dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya, sudah tercermin secara jelas dalam RUU tersebut khususnya yang menyangkut kewajiban (Pasal 5 dan Pasal 6 RUU). Komisi Tetap Pemeriksa juga mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk memeriksa para Penyelenggara Negara sejak sebelum menjabat, selama menjabat, dan sesudah mengakhiri jabatannya dan harus dipublikasikan. Untuk mendorong peran aktif masyarakat agar berani mengungkapkan adanya tindakan KKN juga sudah diatur secara rinci dalam Penjelasan Umum butir 5, Pasal 8, dan Pasal 9 RUU beserta penjelasannya.

dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi Undang-Undang; *Ketiga*, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang, serta *Keempat*, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang.⁴⁰

Namun demikian, sebagaimana keterangan dari Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, bahwa kewajiban penyertaan Naskah Akademik baru ada sejak ditetapkannya Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Naskah Akademik pada Tahun-Tahun sebelum ditetapkan Undang-Undang tersebut sebagian besar tidak tersedia, termasuk dalam hal ini Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang peneliti bahas dalam kajian ini juga tidak tersedia.⁴¹ Dengan demikian ini merupakan salah satu kekurangan Undang-Undang yang peneliti sajikan, karena pada waktu itu belum ada kewajiban menyertakan naskah akademik. Adapun isinya sudah cukup baik dan perlu dilengkapi secara berkelanjutan. Tulisan ini juga bertujuan untuk mewujudkan “naskah akademik” yang dikemas dalam bentuk disertasi.

Undang-Undang ini memuat sepuluh bab serta beberapa Pasal dan ayat yang tertuang di dalamnya. Beberapa bab itu adalah ketentuan umum,

⁴⁰ Inosentius Samsul, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017), 2.

⁴¹ Keterangan ini dilansir dari Bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI/Humas SETJEN DPR RI, “Info Naskah Akademik UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih (*Good Governance*)”, dalam *Keterbukaan Informasi Publik* (20 Agustus 2018) terlampir No. Pendaftar 743/KIP/VIII/2018. Lihat Y.O.I. Tahapari, “Surat Jawaban Tentang Naskah Akademik UU No. 28 Tahun 1999” (Surat Keterangan—SETJEND dan Badan Keahlian DPR RI, 2018).

penyelenggara Negara, asas umum penyelenggaraan Negara, hak dan kewajiban penyelenggara Negara, hubungan antara penyelenggara negara, peran serta masyarakat, komisi pemeriksa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peneliti mencoba mengemukakan pandangan Muladi, bahwa Pemerintah menyadari kehadiran Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, bukan sekedar produk legislasi yang bersifat administratif, tetapi merupakan kebijakan (*policy*) sebagai perwujudan politik hukum nasional dalam pembentukan hukum baru. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang tersebut diharapkan ⁴²:

Pertama, dapat memperkuat dasar hukum yang sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, penuh rasa tanggung jawab, bersih, dan bebas dari praktik-praktik KKN sebagaimana telah ditetapkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Kedua, merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap tindak pidana KKN yang khusus ditujukan kepada pejabat negara dan pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Ketiga, merupakan pendorong untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan (*alertness*) para Penyelenggara Negara dalam

⁴² Muladi, *Persetujuan Rancangan UU Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR RI* (Paper Kerja—Risalah UU SETJEN DPR RI, 1999), 146-147.

melaksanakan tugas dan fungsinya agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dan membahayakan eksistensi negara.

Politik hukum nasional ini adalah hasil dari peralihan era orde baru ke era reformasi. Indikator era reformasi ini dapat dilihat dari konfigurasi politik yang demokratis yang memiliki ciri-ciri, di antaranya; peran serta publik, dominasi parlemen, dan kebebasan pers, sehingga berimplikasi pada karakter produk hukum yang responsif. Ciri-ciri produk hukum ini adalah hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, proses pembuatan partisipatif, fungsi hukum sebagai instrument pelaksana kehendak rakyat, dan interpretasi hukum dilakukan oleh yudikatif.

C. Relevansi UU No. 28 Tahun 1999 dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 memiliki kesesuaian dalam hal asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan UU No. 30 Tahun 2014. Berikut ini dijelaskan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang memiliki tujuan dan harapan sebagai berikut.

Pertama, peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, upaya menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau

- a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, Untuk merealisasikan penyelenggara negara yang mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Ketiga, Praktik KKN tidak hanya dilakukan di antara penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan keberadaan negara, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk pencegahannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud keterangan di atas, perlu dirumuskan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Hal itu memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁶ dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU No. 28 tahun 1999 telah dirumuskan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ini berawal dari masalah sosial dan politik. Kemunculan UU No. 28 Tahun 1999 sejatinya diawali dengan keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya disingkat dengan AAUPB. Pada awalnya keberadaan AAUPB di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di

⁶ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lihat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yaitu: mengingatkan administrasi agar senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Contoh: seorang walikota harus memberikan tanda bahaya pada jalan yang berlobang besar, karena bila tidak diberi tanda dan ada warganya yang celaka karena melewati jalan itu, maka walikota tersebut bisa dituntut.

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) yaitu: bahwa setiap keputusan TUN harus diberi alasan/motivasi yang cukup yang sifatnya benar. Alasan ini harus adil dan benar.

6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*). Setiap badan administrasi negara harus bertindak sesuai dengan kewenangannya, jadi tidak boleh bertindak di luar kewenangannya atau disebut juga penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)

Contoh: dana untuk reboisasi hutan tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar reboisasi hutan.

7. Asas permainan yang layak (*principle of fairplay*)¹¹, badan pemerintah/pejabatnya harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

¹¹ Michiel de Vries, "The Challenge of Good Governance", *The Innovation Journal*, Vo.18 No. 1, (2013), 5. Eloy Anello, *A Framework for Good Governance in The Public Pharmaceutical Sector* (Working Draft—World Health Organization, 2008), 21. Merilee Grindle, *Good Governance: The Inflation of An Idea* (Paper—Harvard University, 2008), 3.

Contoh: asas ini sangat menghargai adanya instansi banding baik melalui instansi administrasi yang tinggi maupun badan-badan peradilan. Penawaran tender harus ditawarkan pada peminatnya secara *fair* atau tidak main belakang.

8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*). Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah tidak memihak dan objektif sehingga masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang wajar.
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*). Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

Contoh: seorang pegawai negeri yang mendapat izin untuk menempati sebuah rumah dinas berharap agar pembayaran listrik dan air minum akan dibayar oleh kantor, tetapi rupanya tidak diberi oleh kantornya, sehingga sewaktu dia meminta uang pengganti pembayaran tersebut, oleh kepala kantornya izin menempati rumah dinas itu dicabut. Tindakan kepala kantor ini tentu saja bertentangan dengan asas ini, karena sudah sewajarnya kantor yang membiayai pengurusan rumah dinas tersebut.

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*). Jika terjadi

tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas²², sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN.

AAUPB juga dimasukkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, AAUPB ini dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi; penyelenggaraan negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efisiensi”. Berdasarkan rumusan ini terlihat bahwa di dalamnya terdapat dua asas tambahan, yaitu asas efisiensi dan asas efektivitas.²³ Hanya saja kedua asas tambahan ini tidak terdapat penjelasannya dalam Undang-Undang tersebut, inilah yang menjadi pembeda dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ini memiliki muatan *good governance*, karena terkandung asas-asas umum pemerintahan yang baik. Miftah Thoha²⁴ menyatakan dalam bukunya *Birokrasi Politik di Indonesia*, *good governance* merupakan konsep yang sejalan dengan

²² Torben Beck Jorgensen and Ditte-Lene Sorensen, *Codes of Good Governance: National or Global Public Value?* (Paper—Departement of Political Science University of Copenhagen, tt), 2.

²³ Derick W. Brinkerhoff, Catherine fort, and Sara Stratton, *Good Governance and Health: Assesing Progress in Rwanda* (Paper—USAID, American, 2009), 30. Diana Saparniene and Ingrida Vlukonyte, “Impelementation of Good Governance principles in Local Self-government the Case of Siauliai City”, *Sosial Research*, Vol.3 No.28, (2012), 101.

²⁴ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia* (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2003), 61.

konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini juga dikaitkan dengan reformasi sektor publik. Di dalam disiplin ilmu atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manjerial yang bersih bebas dari korupsi.

B. Tinjauan *Maqasid Shari'ah* Jasir Auda Terhadap Konsep *Good Governance* dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

Pembahasan ini menjelaskan tentang tinjauan *Maqasid Shari'ah* Jasir Auda dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang di dalamnya tertuang beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, semisal kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang bertujuan sebagai pengarah pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan yang tertuang dalam perundang-undangan ini merupakan produk formal yang harus dipatuhi.

akalnya. Tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi bertumpu pada akal dan jiwa. Dari sini dapat dipahami, bahwa yang diharapkan dari konsep ini adalah terbentuknya masyarakat yang berijwa luhur dan berkarakter adiluhung yang dapat menuntun bangsa Indonesia pada kebaikan yang selaras dengan hukum agama.

Terciptanya masyarakat yang bersatu dan demokratis. Hal ini sesuai dengan prinsip penjagaan keturunan. Agama mengajarkan manusia untuk menikah, sehingga lahir generasi-generasi yang baik. Konsep demokrasi dan persatuan dapat terejawantah, jika manusia melakukan proses regenerasi dengan memiliki keturunan, bersatu dalam bingkai perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Penjagaan keturunan dapat ditafsiri secara luas sebagai upaya menjaga persaudaraan sesama umat Islam, umat manusia, dan bangsa Indonesia.

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju. Hal ini sesuai dengan prinsip penjagaan harta. Kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dapat diwujudkan, jika kebutuhan hidup terpenuhi. Dari sini dapat dipahami, bahwa prinsip kemaslahatan umum merupakan point penting dari visi pemerintahan yang baik. Hal ini adalah cita-cita bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta dijiwai oleh nilai-nilai mulia budaya bangsa dan sesuai dengan keyakinan dan hukum

Pertama: akuntabel hamba dengan Rabb-Nya; yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya untuk dijaga, berupa melakukan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Allah. Di dalam *athar* dijelaskan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada Allah.

Kedua, akuntabel hamba dengan sesama manusia; di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan kepada keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah.

Masih terkait dengan bagian kedua ini adalah akuntabel/amanah ini adalah keadilan para umara terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan mengarahkan mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat. Seperti pendidikan yang baik, memperoleh rezeki yang halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum yang menguatkan keimanan, menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa. Selain itu mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, yakni tidak menyebarkan rahasia masing-masing pihak, terutama rahasia khusus mereka yang biasanya tidak layak diketahui orang lain.

Ketiga, akuntabel manusia terhadap dirinya sendiri, semisal hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat dalam masalah

Pada masa Rasulullah masih hidup, tidak pernah dikatakan ijmak dalam menetapkan suatu hukum. Segala persoalan dikembalikan kepada beliau, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya.

Ijmak itu dapat terealisasi jika ada empat unsur. *Pertama*, Ada sejumlah mujtahid ketika suatu kejadian, karena kesepakatan (ijmak) tidak mungkin ada kalau tidak ada sejumlah mujtahid. Masing-masing mengemukakan pendapat yang ada penyelesaian pandangan. *Kedua*, Bila ada konsensus mujtahid umat Islam terhadap hukum *shara'* tentang suatu masalah atau kejadian pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompok mereka. Kalau mujtahid Mekah, Madinah, Irak, Hijaz saja umpamanya yang sepakat terhadap suatu hukum *shara'* tidak dapat dikatakan Ijmak menurut *shara'* kalau bersifat regional. *Ketiga*, Konsensus semua mujtahid itu dapat diwujudkan dalam suatu hukum tidak dapat dianggap Ijmak kalau hanya berdasarkan pendapat mayoritas, jika mayoritas setuju, sedangkan minoritas tidak setuju. Berarti tetap ada perbedaan pendapat. *Keempat*, Kesepakatan para mujtahid itu terjadi setelah ada tukar menukar pendapat lebih dahulu, sehingga diyakini betul putusan yang akan ditetapkan.

Di antara kasus hukum yang menjadikan Ijmak sebagai dasar hukumnya adalah: Upaya pembukuan Alquran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar al- idiq r.a. Pengangkatan Abu Bakar al-

kesehatan, (4) *cognitive nature*, bermakna, *good governance* sesuai dengan fikih *siy saḥ*, (5) *openness*, bermakna *good governance* dihubungkan dengan filsafat hukum Islam, (6) *multidimensionality*, bermakna ketika ada aksioma-aksioma yang bertentangan tentang *good governance*, maka hal ini dicari titik temunya, didialogkan sehingga menemukan solusi yang tepat dan muncul kemaslahatan yang hakiki.

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan pemaparan dan analisis data pada bab sebelumnya, diperoleh temuan yang sesuai dengan signifikansi masalah yang diajukan. Ijtihad berdasarkan *Maq id al-Shar 'ah* diperlukan di era yang terus berkembang ini untuk memecahkan masalah yang tidak diterangkan secara spesifik dan detail dalam alquran dan al- adis. Dengan dasar inilah diperlukan *Manhaj Maqa id* yang merupakan metode penggalian hukum yang berdasarkan *Maq id al-Shar 'ah* dalam menelaah lebih jauh penyimpangan kekuasaan yang terjadi di lapangan, sehingga *good governance* belum terwujud secara maksimal. Jika melihat Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan peraturan yang ada setelahnya, maka sejatinya sudah terdapat muatan Islam dalam Undang-Undang atau terdapat muatan Hukum Islam secara khusus. Bahkan lebih khusus lagi terdapat muatan *Maq id al-Shar 'ah*, sehingga Bangsa Indonesia telah menerapkan nilai-nilai *Isl m* secara implisit yang dapat diterima akal sehat, terdapat kema la atan yang pasti, dan berdimensi universal. Dengan

demikian, tulisan ini mempertegas nilai-nilai *Islam* yang tertuang dalam Undang-Undang.

Fokus utama *Maq'id al-Shar'ah* adalah eksistensi kemaslahatan dalam menentukan suatu status hukum, yakni berpihak pada kemudahan (*fiqh al-taysir*), dan berfokus pada teks dalil serta konteks peristiwa, sehingga aspek akibat sebagai upaya mengetahui aspek maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dapat diketahui. Adapun *Manhaj Maq'id* merupakan temuan tipologi dalam tulisan ini, mengingat bidang hukum Islam begitu luas, sebagaimana diungkapkan oleh Jasser Auda Hukum Islam terbagi menjadi tiga. *Pertama*, *shar'ah* merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, *Shar'ah* adalah Alquran dan al-Sunnah. *Kedua*, *Fiqh* adalah koleksi, dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli Hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi *Shar'ah* (dalam arti di atas) pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang empat belas abad terakhir. *Ketiga*, fatwa adalah aplikasi *shar'ah* atau *fiqh* (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini.

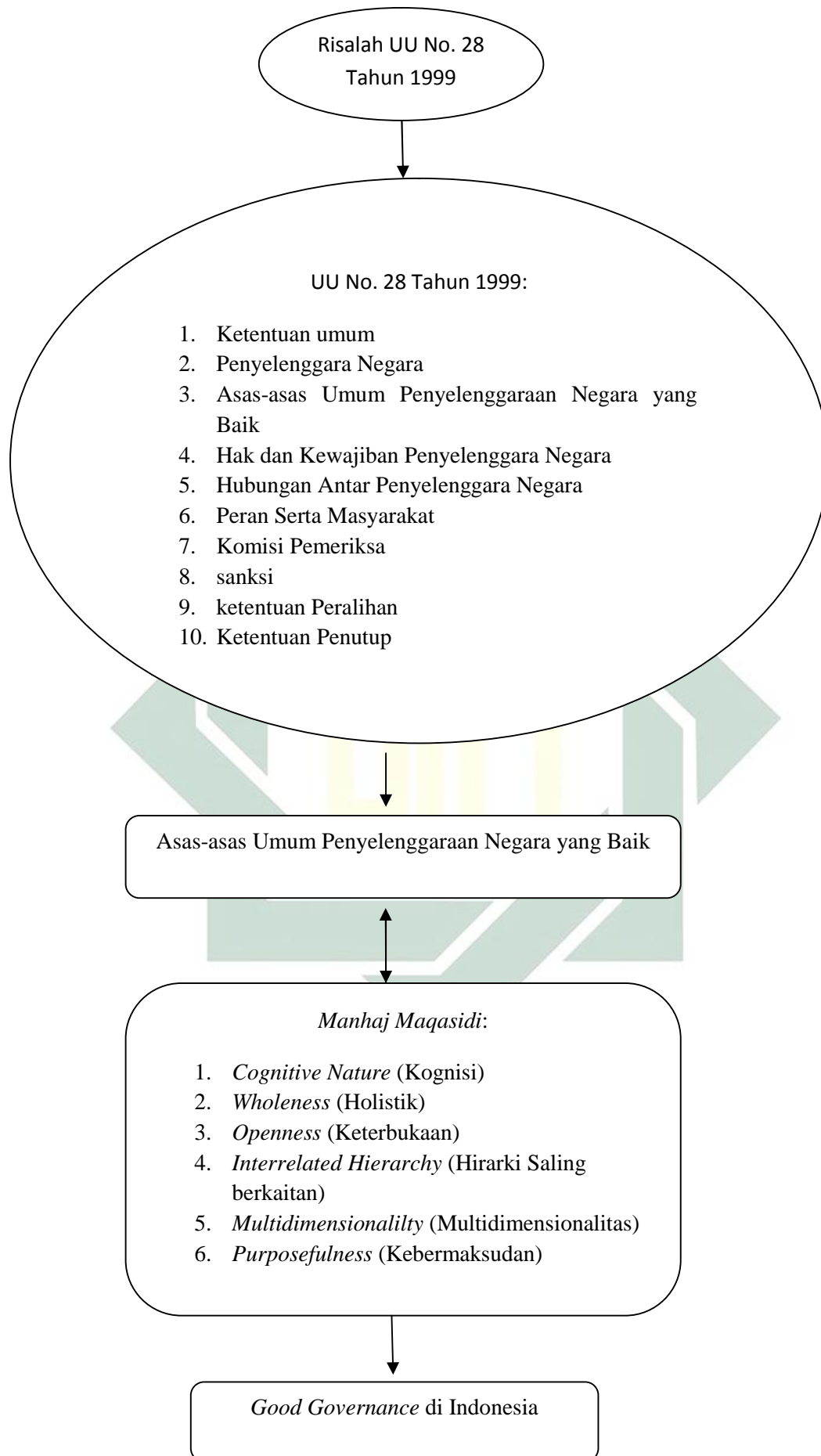
Hukum Islam yang dipakai oleh peneliti adalah *Manhaj Maq'id* yang masih dalam tahapan menuju produk *fiqh*. Peneliti juga mengemukakan temuan sudut pandang (*paradigmatic*). Sebagaimana dinyatakan oleh Jasser Auda dalam kitab *Maq'id al-Shar'ah 'ind Im m al-Qaraw*, *Maq'id*/kebermaksudan mencakup dua pengertian. Yaitu,

berita di media sosial semisal Koran, televisi, dan media elektronik lainnya, sebab peneliti bukan praktisi maupun pejabat pemeriksa keuangan negara semisal KPK dan lain sebagainya.

D. Rekomendasi

Melalui pembahasan yang penulis sampaikan, sebagai bagian akhir dari penulisan disertasi ini, perlu adanya rekomendasi dari penulis sebagai bahan renungan, pertimbangan, dan acuan bagi pembaca. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan tiga rekomendasi.

1. Kajian *good governance* dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan pendekatan *Manhaj Maqadid* direkomendasikan untuk dapat dijadikan rujukan di lembaga pengadilan, semisal Tipikor, KPK, Kejaksaan Agung, serta Pemerintahan Daerah hingga Pusat.
2. Kajian *Maqadid al-Shar'ah* dibutuhkan dalam menghadapi era yang berkembang. Masyarakat dianjurkan agar memahami betul *Maqadid al-Shar'ah* untuk memecahkan masalah yang secara jelas tidak ada penjelasan secara spesifik dalam Alquran dan al-Sunnah. Dengan demikian perlu adanya metode penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memahami secara mendalam tentang disiplin ilmu *Maqadid al-Shar'ah* sehingga tidak terjadi stagnasi dan terwujudlah hukum yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman.



Korelasi Asas-Asas *Good Governance* dengan Fitur-Fitur Jasir Auda

Tabel II

No.	Asas-Asas <i>Good Governance</i>	Fitur-Fitur Jasir Auda
1.	<i>Principle of Legal Security</i> (Asas Kepastian Hukum)	<i>Cognitive Nature</i> (Kognisi)
2.	<i>Principle of Proportionality</i> (Asas keseimbangan)	<i>Cognitive Nature</i> (Kognisi)
3.	<i>Principle of equating</i> (Asas kesamaan dalam mengambil keputusan)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
4.	<i>Principle of Carefulness</i> (Asas Bertindak Cermat)	<i>Interrelated Hierarchy</i> (Hirarki Saling berkaitan)
5.	<i>Principle of Motivation</i> (Asas Motivasi untuk setiap keputusan)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
6.	<i>Principle of of non misuse of competence</i> (Asas jangan mencampur adukkan kewenangan)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
7.	<i>Principle of Fairplay</i> (Asas permainan yang layak)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
8.	<i>Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitzanes</i> (Asas Keadilan atau kewajaran)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
9.	<i>Principle of Meeting Raised Expectation</i> (Asas menanggapi penghargaan yang wajar)	<i>Multidimensionalilty</i> (Multidimensionalitas)
10.	<i>Principle of Undoing the Consequences of an Annudled Decesion</i> (Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan)
11.	<i>Principle of Protecting the personal way of life</i> (Asas perlindungan cara hidup pribadi)	<i>Cognitive Nature</i> (Kognisi)
12.	<i>Principle of Sapientie</i> (Asas Kebijakanaksanaan)	<i>Purposefulness</i> (Kebermaksudan) <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hirarki Saling berkaitan)
13.	<i>Principle of Public Service</i> (Asas Penyelenggaraan Keputusan Umum)	<i>Interrelated Hierarchy</i> (Hirarki Saling berkaitan)

